

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2018 – 2023 dalam rangka menyajikan gambaran rincian tentang rencana kerja lima tahunan.



Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone ini merupakan salah satu penjabaran Program Indikatif dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023. Keberhasilan pelaksanaannya akan sangat tergantung dukungan dan partisipasi aktif dari para stakeholder terkait, termasuk dukungan pembiayaan dari APBD Pemerintah Kabupaten Bone dan APBN dari Pemerintah Pusat serta sumber - sumber pembiayaan lainnya yang sah.

Akhir kata, semoga dokumen RENSTRA Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 ini dapat bermanfaat untuk mencapai cita-cita luhur visi Pemerintah Kabupaten Bone yaitu *Masyarakat Bone Yang Mandiri Berdaya Saing dan Sejahtera*.

Watampone, April 2019

**KEPALA DINAS,**

**Ir. H. SUNARDI NURDIN, M.Si**

NIP : 19611231 198802 1 008

Pangkat : Pembina Utama Muda

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL, .....	iv
DAFTAR GAMBAR, .....	v
I. PENDAHULUAN .....	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN TPH DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BONE .....	
2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan .....	7
2.2 Sumber Daya Dinas Pertanian TPH dan Perkebunan .....	29
2.3 Perlengkapan Dinas Pertanian TPH dan Perkebunan .....	31
2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian TPH dan Perkebunan .....	34
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian TPH dan Perkebunan .....	43
III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN .....	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian TPH dan Perkebunan .....	46
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Terpilih .....	48

3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	50
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	53
3.5.	Penentuan Isu-Isu Strategis .....	60
IV. TUJUAN DAN SASARAN .....		
4.1	Tujuan Jangka Menengah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan .....	68
4.2	Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian TPH .....	68
V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....		
5.1	Strategi .....	70
5.2	Kebijakan .....	70
VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....		
6.1	Rencana Program dan Kegiatan .....	74
6.2	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan .....	75
VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....		87
VIII. PENUTUP .....		89

## DAFTAR TABEL

2.2.1. Keadaan Aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone Tahun 2018, .....	30
2.2.2. Keadaan Aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018 .....	30
2.3.1. Sarana Mobilitas Aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone Tahun 2018.....	31
2.3.2. Tanah yang Dikuasai oleh Dinas Pertanian TPH dan Perkebunan Tahun 2018 .....	32
2.3.3. Bangunan yang Dikuasai Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2018 .....	33
2.4.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone Tahun 2018, .....	36
2.4.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2013-2018 .....	39
2.4.3. Capaian Tanam, Panen, Produksi, Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2013-2018 .....	40
3.1.1. Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone Tahun 2018 .....	48
3.2.1. Keterkaitan Antara Rumusan Misi Dengan Pokok Visi .....	50
3.3.1. Pokok – Pokok Visi Kementerian Pertanian .....	51
4.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 .....	69
5.1. Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bone.....	72
6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bone .....	79
7.1. Indikator Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bone .....	88

## DAFTAR GAMBAR

2.1	Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bone Tahun 2018 .....	8
2.4.	Luas Kawasan Suaka Alam di Kabupaten Bone, Tahun 2017.....	56

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan. Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Kementerian Pertanian dan bersifat indikatif.

RPJMD adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program SKPD, lintas OPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana – rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD kabupaten Bone tahun 2018 – 2023 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan wakil Bupati Bone terpilih yang berfokus pada aspirasi dan kepentingan segenap masyarakat kabupaten Bone, identifikasi dan penanganan isu – isu strategis dengan sasaran yang dinamis, mengikuti perkembangan zaman dan berorientasi pada tindakan adaptif RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rancangan awal Renstra merupakan penjabaran yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan selama 5 ( lima ) tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah dijadikan sebagai kertas kerja (*working paper*) sebagai tahap penyusunan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui beberapa tahap yaitu: Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, Forum Perangkat Daerah, Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dan Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan RPJMD kerangka posisi dan peran pembangunan pertanian dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, dititik beratkan misi mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan.

Keterkaitan dengan Renstra Kementerian Pertanian, posisi dan peran Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan menyangkut prioritas pembangunan yaitu Pertama peningkatan produktivitas yang terdiri dari penggunaan benih bermutu, pemupukan secara berimbang dan organik, penggunaan pengairan yang efisien serta penggunaan alsintan yang tepat guna; Kedua perluasan areal tanam yaitu melalui kegiatan optimasi lahan, cetak sawah JITUT/JIDES, Pompanisasi, sumur resapan dan embung serta konservasi dengan memanfaatkan SDA secara bijaksana; Ketiga Pengamanan Produksi yaitu dengan penanganan dampak fenomena iklim, pengendalian OPT serta penanganan pasca panen dan Keempat Penguatan Kelembagaan dan Pembiayaan yaitu melalui PUAP, LM3, PNPM Mandiri; Kelompok tani atau Gapoktan; UPJA atau Kios Saprodi, Pelayanan Perbenihan, KKP- EKUR serta melalui Kemitraan.

Untuk mensinergikan Renstra Kementerian Pertanian Direktorat Tanaman Pangan, kebijakan yang harus dipacu adalah mensinergikan seluruh sumber daya pertanian dalam rangka peningkatan daya saing usaha tanaman pangan hortikultura dan perkebunan, nilai tambah, produktivitas dan mutu produk tanaman pangan hortikultura dan perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat tani dan penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta

didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun kebijakan teknis pembangunan pertanian yaitu meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman pangan dan hortikultura berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, sumber daya manusia (SDM), kelembagaan dan kemitraan usaha, investasi usaha tanaman pangan sesuai kaidah pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup dengan dukungan pengembangan sistem informasi manajemen tanaman pangan hortikultura dan perkebunan.

Keterkaitan dengan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu membawa amanah pada focus kegiatan pembinaan melalui penerapan Pola Sekolah Lapang (SL) untuk peningkatan produktivitas komoditas padi, jagung dan kedelai di wilayah tertentu. Dengan system ini diharapkan terbina kawasan-kawasan andalan untuk pengembangan komoditas padi non hibrida, padi hibrida, padi lahan kering jagung hibrida dan kedelai.

Pembinaan umum terhadap areal pertanaman yang ada melalui kegiatan gerakan, demplot/demarea, penyuluhan dengan materi optimalisasi penerapan teknologi, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), banjir dan kekeringan, penguatan kelembagaan kelompok tani serta penyediaan subsidi pupuk dan benih. Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023, peraturan perundang – undangan yang dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut :

- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bonei Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013-2018.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bone.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Secara umum maksud Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone adalah untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 terutama yang terkait dengan urusan pertanian.

Tujuan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone yang ditetapkan setiap tahun;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone
3. Sebagai penuntun dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan demikian maka dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 disusun secara sistematis seperti berikut :

- **Bab I Pendahuluan**, memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah.
- **BaB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**, memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah
- **BAB III. Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah** terdiri dari 4 sub bab yaitu :
  - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan daerah beserta factor-faktor yang mempengaruhinya
  - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih, Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan OPD dipaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.
  - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra  
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor – faktor penghambat ataupun faktor – faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L maupun Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor – faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

#### **BAB IV Tujuan dan Sasaran terdiri dari 2 sub bab yaitu :**

##### **4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan jangka menengah Perangkat Daerah.

##### **4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya.

#### **BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### **BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VIII PENUTUP**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone**

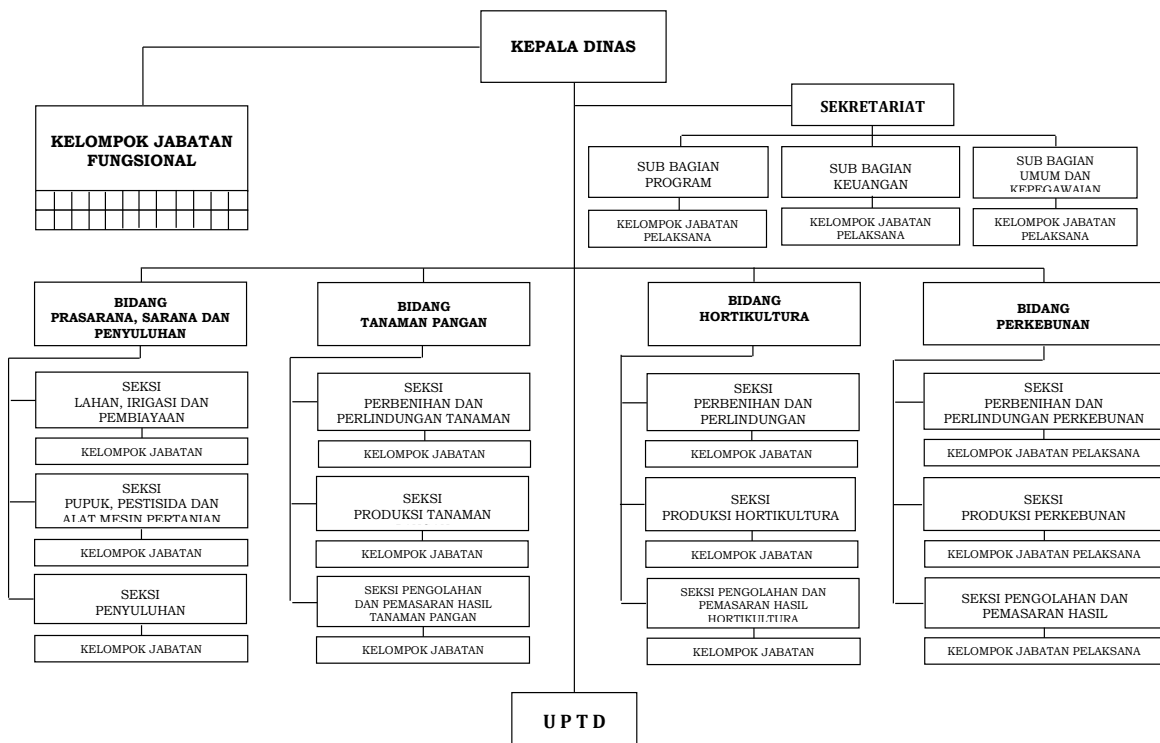
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan maka susunannya adalah sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat terdiri dari :
  1. Sub Bagian Program
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan terdiri dari :
  1. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan
  2. Seksi Pupuk, Pestisida dan alat mesin pertanian
  3. Seksi Penyuluhan Pertanian
- d. Bidang Tanaman Pangan terdiri dari :
  1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan
  2. Seksi Produksi Tanaman Pangan
  3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran hasil Tanaman Pangan
- e. Bidang Hortikultura terdiri dari :
  1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura
  2. Seksi Produksi Hortikultura
  3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran hasil Hortikultura
- f. Bidang Perkebunan terdiri dari :
  1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan
  2. Seksi Produksi Perkebunan
  3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran hasil Perkebunan
- g. UPTD
- h. Kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi  
Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone



## Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 pada Bab IX menyatakan bahwa Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone mempunyai fungsi :

**1. Kepala Dinas**

- (1) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. merumuskan kebijakan teknis di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
  - b. menyusun Program dan Programa Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
  - c. pengembangan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
  - d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih/ bibit Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
  - e. pengawasan penggunaan sarana Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
  - f. pembinaan Produksi di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
  - g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
  - h. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;

- i. pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
- j. memberi izin usaha/rekomendasi teknis Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
- k. penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
- l. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- m. pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- n. penyampaian laporan hasil evaluasi saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretariat Dinas**

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.
- (2) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana program dan anggaran belanja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
  - b. pengkoordinasian tugas-tugas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
  - c. penghimpunan bahan untuk penyusunan peraturan-peraturan daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan pengelolaan administrasi, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

- d. penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. pelaksanaan pembinaan staf; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

**Sekretariat terdiri atas :**

**a. Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas :**

- (a). Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, membuat laporan dan evaluasi program kerja;
- (b). melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
- (c). melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi lingkungan;
- (d). melaksanakan sosialisasi program di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
- (e). melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- (f). menyiapkan rencana umum pengadaan;
- (g). membuat rencana kerja tahunan; dan
- (h). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.



**b. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :**

- (a). menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (b). mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;
- (c). mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (d). mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- (e). membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (f). membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- (g). menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
- (h). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

**c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :**

- (a). melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- (b). menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- (c). menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, komunikasi dan informasi serta penyiapan rapat-rapat dinas;

- (d). membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- (e). melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan latihan;
- (f). melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- (g). menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
- (h). melaksanakan pembinaan staf; dan
- (i). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

### **3. Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan**

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.
- (2) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan dibidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
  - b. penyediaan dukungan infrastruktur dibidang prasarana, sarana dan penyuluhan ;
  - c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;

- d. penyediaan, pengawasan, dan pembimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- f. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan terdiri dari 3 seksi yaitu :

**1. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan dipimpin oleh Kepala Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan mempunyai tugas :**

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, anggaran pembiayaan investasi Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis pembiayaan pertanian ;
- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
- d. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- e. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- f. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
- h. melakukan pendamping dan supervisi pembiayaan pertanian;
- i. melakukan bimbingan, fasilitas dan pelayanan investasi pertanian;

- j. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan terkait tugasnya.

**2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian dipimpin oleh Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas :**

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- b. melakukan penyiapan bahaan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- c. melakukan monitoring penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- d. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- e. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan terkait tugasnya.

**3. Seksi penyuluhan pertanian dipimpin oleh Kepala Seksi penyuluhan pertanian mempunyai tugas :**

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi penyuluhan pertanian
- b. menyusun kebijakan dan programa penyuluhan pertanian;
- c. melaksanakan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;

- d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- f. memberikan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. meningkatkan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
- h. memantau dan evaluasi penyuluhan pertanian;
- i. memfasilitasi koordinasi kelompok fungsional penyuluh pertanian;
- j. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi penyuluhan pertanian; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan terkait tugasnya.

#### **4. Bidang Tanaman Pangan**

- (1) Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi ;
  - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
  - b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;

- c. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

**Bidang Tanaman Pangan terdiri atas 3 seksi yaitu :**

1. Seksi perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dipimpin oleh Kepala Seksi perbenihan dan perlindungan tanaman pangan mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;

- g. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
  - j. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan OPT;
  - k. melaksanakan menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
  - l. melaksanakan pengelolaan data OPT;
  - m. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
  - n. melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
  - o. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
  - p. melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
  - q. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
  - r. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
  - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan terkait tugasnya.
2. Seksi produksi Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;

- c. melaksanakan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan;
  - d. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan;
  - e. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan;
  - f. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan terkait dengan tugasnya.
3. Seksi Pengolahan dan pemasaran hasil Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi Pengolahan dan pemasaran hasil Tanaman Pangan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
  - d. melaksanakan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan;
  - f. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
  - g. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;



- h. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- j. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan sesuai dengan tugasnya.

## **5. Bidang Hortikultura**

- (1) Bidang Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang Hortikultura mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi ;
  - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
  - b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
  - c. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang hortikultura;
  - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
  - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
  - f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;

- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Bidang Hortikultura terdiri dari 3 seksi yaitu :

1. Seksi perbenihan dan perlindungan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Seksi perbenihan dan perlindungan Hortikultura mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan perlindungan hortikultura;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan di bidang hortikultura;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang hortikultura;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang hortikultura;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang hortikultura;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
  - j. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan OPT;

- k. melaksanakan menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
  - l. melaksanakan pengelolaan data OPT;
  - m. melaksanakan menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
  - n. melaksanakan menyiapkan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
  - o. melaksanakan menyiapkan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
  - p. melaksanakan menyiapkan bahan penanggulangan bencana alam;
  - q. melaksanakan menyiapkan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang hortikultura;
  - r. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan perlindungan hortikultura; dan
  - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hortikultura terkait tugasnya.
- (2). Seksi produksi Hortikultura dipimpin oleh Kepala Seksi produksi Hortikultura mempunyai tugas :
- a. melaksanakan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Hortikultura;
  - b. melaksanakan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi di bidang Hortikultura;
  - c. melaksanakan menyiapkan bahan kebijakan produksi di bidang Hortikultura;
  - d. melaksanakan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang Hortikultura;

- e. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang Hortikultura;
  - f. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang Hortikultura;
  - g. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Hortikultura; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hortikultura terkait tugasnya.
- (3). Seksi Pengolahan dan pemasaran hasil Hortikultura dipimpin oleh Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang Hortikultura;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang Hortikultura;
  - d. melaksanakan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang Hortikultura;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang Hortikultura;
  - f. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
  - g. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang Hortikultura;

- h. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Hortikultura;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Hortikultura;
- j. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hortikultura terkait tugasnya.

## **6. Bidang Perkebunan**

- (1) Kepala Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Perkebunan;
  - b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang Perkebunan;
  - c. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang Perkebunan;
  - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang Perkebunan;
  - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang Perkebunan;

- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Perkebunan;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang Perkebunan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Bidang Perkebunan terdiri dari 3 seksi yaitu :

1. Seksi perbenihan dan perlindungan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Seksi perbenihan dan perlindungan Perkebunan mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan di bidang Perkebunan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih/bibit di bidang Perkebunan;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih/bibit di bidang Perkebunan;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih/bibit dan pengendalian sumber benih/bibit di bidang Perkebunan;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih/bibit dan pengembangan varietas unggul;
  - g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih/bibit yang beredar;

- h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih/bibit dan kelembagaan benih/bibit;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
  - j. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan OPT;
  - k. melaksanakan menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
  - l. melaksanakan pengelolaan data OPT;
  - m. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
  - n. melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
  - o. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
  - p. melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
  - q. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang Perkebunan;
  - r. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan; dan
  - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan terkait tugasnya.
2. Seksi produksi Perkebunan dipimpin oleh Kepala Seksi produksi Perkebunan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Perkebunan ;

- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi di bidang Perkebunan ;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan produksi di bidang Perkebunan ;
  - d. melaksanakan menyiapkan bahan rencana taman dan produksi di bidang Perkebunan ;
  - e. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang Perkebunan ;
  - f. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang Perkebunan;
  - g. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Perkebunan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan terkait tugasnya.
3. Seksi Pengolahan dan pemasaran hasil Perkebunan dipimpin oleh Kepala Seksi Pengolahan dan pemasaran hasil Perkebunan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang Perkebunan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang Perkebunan;
  - d. melaksanakan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang Hortikultura;



- e. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang Perkebunan;
- f. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- g. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang Perkebunan ;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Perkebunan;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Perkebunan;
- j. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan terkait tugasnya.

#### **7. UPT Dinas**

- (1) UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas sesuai bidang teknis yang diurus.
- (2) Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **8. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas membantu kepala sub bagian dan/atau kepala seksi terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan .
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2.2 Sumber Daya Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone**

Aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone tahun 2018 sebanyak 156 orang, terdiri dari pegawai tetap teknis 145 orang dan pegawai tidak tetap/honor 80 orang. Dari 156 orang aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone tahun 2018, terdiri atas tingkat pendidikan yang berbeda mulai dari Tingkat Strata 2 sampai dengan tingkat SD. Komposisi aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2.1. dan Tabel 2.2.2.

Tabel 2.2.1. Keadaan Aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone Tahun 2018

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	TEKNIS	ADMINISTRASI	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda, IV/c	3	-	3
2	Pembina Tk.I, IV/b	22	-	22
3	Pembina, IV/a	17	-	17
4	Penata Tk I, III/d	32	-	32
5	Penata, III/c	17	-	17
6	Penata Muda Tk I, III/b	23	-	19
7	Penata Muda, III/a	23	-	16
8	Pengatur Tk I. II/d	6	-	6
9	Pengatur . II/c	13	-	13
10	Pengatur Muda Tk I. II/b	8	-	8
11	Pengatur Muda. II/a	2	-	2
12	Juru Tk I, I/d	-	-	-
13	Juru, I/c	-	-	-
14	Juru Muda Tk I, I/b	-	-	-
15	Juru Muda, I/a	-	-	-
16	Pegawai Tidak Tetap/Honor	20	60	80
J U M L A H		176	60	236

Tabel 2.2.2. Keadaan Aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Tahun 2018)

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Doktoral (S-3) Pertanian	-
2	Pasca Sarjana (S-2) Pertanian Agribisnis	20
3	Pasca Sarjana (S-2) Informasi Publik	-
4	Pasca Sarjana (S-2) Administrasi Negara	2
5	Sarjana (S-1) Pertanian	87
6	Sarjana (S-1) Administrasi	8
7	Sarjana Muda / (D-4) Pertanian	5
8	Sarjana Muda / (D-3) Pertanian	1
9	Sarjana Muda / (D-3) Administrasi	3
10	D1 Pertanian	-
11	D1 Administrasi, Ekonomi, dll	-
12	SPMA	1
13	SLTA	29
14	SLTP	-
15	SD	-
16	Pegawai Tidak Tetap/Honor	85
J U M L A H		241

### 2.3. Perlengkapan

Sarana dan prasarana Perlengkapan organisasi meliputi seluruh aset yang digunakan untuk melaksanakan dan melancarkan tugas – tugas organisasi baik dalam memberikan pelayanan, pelaksanaan pembangunan pertanian maupun pembinaan kepada masyarakat tani dan pembinaan aparat pertanian itu sendiri. Sarana dan prasarana organisasi dapat berupa barang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan; maupun barang bergerak seperti sarana mobilitas ( mobil dan sepeda motor ), alat peraga ( elektronik dan non elektronik), sarana perkantoran dan lainnya, secara berturut-turut akan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3.1. Sarana dan Prasarana Perlengkapan yang Dimiliki Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2018

NO.	NAMA BARANG	KEADAAN BARANG			JUMLAH
		BAIK	KURANG BAIK	RUSAK	
1	Mobil Kijang Station	4	-	-	4
2	Mobil Pick up	1	-	-	1
3	Motor	167	-	3	170
4	Meja Pimpinan	2	-	-	2
5	Meja Rapat	1	-	-	1
6	Meja Pertemuan	8	-	3	11
7	Meja Kerja (1/2 Biro)	54	-	2	56
8	Meja Komputer	3	-	-	3
9	Meja Kerja	29	-	2	27
10	Kursi Rapat	47	-	-	47
11	Kursi Kerja	253	-	15	210
12	Kursi Tamu ( Sopa )	3 Set	-	-	3 Set
13	Kursi Pimpinan	2	-	-	2
14	Kursi Putar	42	-	10	52
15	Televisi	1	-	1	2
16	AC Ruangan	20	-	1	21
17	Lemari Arsip (3 pintu)	3	-	-	3
18	Lemari Arsip (2 pintu)	35	-	-	35
19	Lemari Buku	1	-	-	1
20	Lemari Besi	1	-	-	1
21	Rak Serbaguna	1	-	-	1
22	Rak Kultur 4 susun	4	-	-	4
23	Komputer	36	-	4	40

24	Printer	69	-	13	82
25	Filling Kabinet	17	-	3	20
26	Brand Kas	1	-	-	1
27	Sound Sistem	8	-	-	8
28	LCD	28	-	-	28
29	Warles	7	-	1	6
30	Kulkas	3	-	-	13
31	Laptop	43	-	4	47
32	Pesawat Tlpn (Fax)	1	-	-	1
33	Pemotong Kertas	1	-	1	0
34	Mesin Ketik	2	-	1	1
35	GPS	2	-	-	2
36	Mesin Absensi	2	-	-	2
37	Sound System	8	-	-	8
38	White Board	42	-	-	42

Prasarana Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan berupa Tanah yang dikuasai oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, terdiri dari tanah yang diatasnya berdiri bangunan kantor / gedung milik dinas, dan tanah yang dimanfaatkan untuk percontohan teknologi maupun sebagai kebun perbanyakan benih / bibit tanaman pangan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3.2. Tanah yang dikuasai oleh Dinas Pertanian Tahun 2018

NO	URAIAN	LOKASI	LUAS (M2)	PEMANFAATAN
1	Tanah Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jl. S. Hasanuddin Watampone	1.601	Bangunan Kantor Dinas
2	Tanah Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jl. Yos Sudarso No.	14.37	Bangunan Kantor Dinas
3	Tanah Kantor Balai Benih Padi	Kahu	20	Bangunan Kantor
4	Tanah Kantor Balai Benih Palawija	Kahu	90.269	Bangunan Kantor
5	Tanah Kantor Balai Benih Hortikultura	Barebbo	18.5	Bangunan Kantor
6	Persawahan	Mare	9.077	Percontohan

Bangunan yang dikuasai oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari kantor / gedung milik rumah dinas dan lain sebagainya, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.3.3. Bangunan yang dikuasai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone Tahun 2018

NO	NAMA BANGUNAN	LOKASI / ALAMAT	UKURAN ( M2 )	TAHUN PEMBUATAN	SUMBER PEMBIAYAAN	KET
1	Kantor Dinas Pertanian TPH	Jl. Sultan Hasanuddin No. 12	1601	1960	APBD I	-
2	Kantor Dinas Pertanian TPH	Jl. Yos Sudarso No.	14.37	2009	APBD I	-
3	Kantor BPP PalattaE	Tompo Batu Kecamatan Kahu	90.269	1965	APBD I	-
4	Kantor Balai Benih Hortikultura	Attobaja Kec. Barebbo	-	1965	APBD I	-
5	Kantor Balai Benih padi	Balle kec.Kahu	20	1967	ABPD I	-
6	Kanto BPP Dua BoccoE	Pattiro	19.95	1965	APBD I	DISTPHP
7	Kantor BPP Tonra	Gareccing	19.788	1965	APBD I	DISTPHP
8	Kantor BPP Mare	Tellu BoccoE	13.22	1965	APBD I	DISTPHP
9	Kantor BBI/ BPP Barebbo	Attobaja	18.5	1965	APBD I	DISTPHP
10	Kantor BPP Awangpone	Mallari	20	1965	APBD I	DISTPHP
11	Kantor BPP Palakka	M. Bua	5	1969	APBD I	DISTPHP
12	Kantor BPP Bengo	Selli	7.5	1967	APBD I	DISTPHP
13	Kantor BPP Ajangale	P. Pute	10	2006	Bank Dunia ( APBN )	DISTPHP
14	Kantor BPP Lappariaja	Uae Kecte	4.5	2006	Bank Dunia ( APBN )	DISTPHP
15	Kantor BPP Salomekko	Pancai tanah	1.7	2006	Bank Dunia ( APBN )	DISTPHP
16	Kantor BPP T Limpoe	Gaya baru	10.15	2009	Bank Dunia ( APBN )	DISTPHP
17	Kantor BPP Libureng	P. Pidange	10.021	2009	Bank Dunia ( APBN )	DISTPHP

18	Kantor BPP Patimpeng	Pacing	11.296	2009	Bank Dunia ( APBN )	DISTPHP
19	Kantor BPP Cenrana	Pacubbe	2.055	2010	Bank Dunia ( APBN )	DISTPHP
20	Kantor BPP Amali	Mampotu	9.618	2009	Bank Dunia ( APBN )	DISTPHP
21	Kantor BPP Ponre	Pattimpa	9.848	2009	Bank Dunia ( APBN )	DISTPHP
22	Kantor BPP Sibulue	Cinnong	2.225	2009	Bank Dunia ( APBN )	DISTPHP
23	Kantor BPP T. Riattang	Biru	4.135	2009	Bank Dunia ( APBN )	DISTPHP
24	Kantor BPP T.R Barat	WT Palakka	4.282	2009	Bank Dunia ( APBN )	DISTPHP
25	Kantor BPP Lamuru	Pole Onro	2.505	2010	Bank Dunia ( APBN )	DISTPHP
26	Persawahan	T. Poccoe Mare	9.077	-	-	-

#### 2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone

Pencapaian kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan kabupaten Bone Selama lima tahun, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 diuraikan secara singkat melalui tabel 2.4.1.

Produksi Tanaman Pangan mengalami rata – rata peningkatan setiap tahun. Produksi padi mengalami peningkatan rata – rata sebesar 11,88 persen setiap tahun. Demikian pula pada jagung, mengalami peningkatan 33,77 % setiap tahun.

Peningkatan produksi Kedelai berfluktuatif selama 20013 - 2017, yaitu mencapai rata-rata 21,86 % setiap tahun. Produksi kedelai sedikit mengalami penurunan di Tahun 2017 sekitar 12.959 dari target 12.923 ton biji kering, namun ditahun 2009 dan 2010 mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu sebesar 27,53 % dengan realisasi 18.430 ton dan 21.642 ton biji kering dari target 14.511 dan 14570 ton biji kering sedang pada tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan sekitar 21,71 % dari target.

Peningkatan produksi Kacang tanah, Kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, serta produksi hortikultura selama 2013 - 2018, dengan perkembangan produksinya dapat dilihat pada Tabel 2.4.1. berikut ini.



Tabel 2.4.1.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan  
Kabupaten Bone

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target					Realisasi					Rasio					Rerata ( Tahun )
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan</b>																
- Padi	738.844	824.395	873.859	926.290	981.867	777.731	885.427	983.219	1.058.812	1.216.759	100,00	107,40	112,51	114,31	123,92	
- Jagung	136.309	145.169	154.605	164.654	175.357	136.309	213.391	284.070	379.789	424.441	100,00	146,99	183,74	230,66	242,04	
- Kedelai	16.734	18.496	19.421	20.392	21.411	17.615	33.267	28.548	53.881	12.959	100,00	179,86	147,00	264,23	60,52	
- Kacang Tanah	2.936	3.122	3.153	3.185	3.217	3.091	20.572	16.953	13.808	1.968	100,00	658,94	537,68	433,53	61,18	
- Kacang Hijau	10.668	11.341	11.455	11.569	11.685	11.229	5.588	1.487	1.766	704	100,00	49,27	12,98	15,26	6,02	
- Ubi Kaju	4.550	4.861	4.934	5.008	5.083	4.789	7.094	3.499	3.499	2.958	100,00	145,94	70,92	69,87	58,19	
- Ubi Jalar	3.817	4.078	4.139	4.202	4.265	4.018	5.439	2.224	9.287	4.918	100,00	133,37	53,73	221,01	115,31	
<b>Peningkatan Produksi Hortikultura</b>																
Bawang Merah	1.150	1.450	1.750	1.900	2.150	581	221	1.225	1.406	2.002,9	50,52	15,22	69,98	74,00	93,16	

Tomat	1.825	2.250	2.545	2.750	2.985	1.945	1.989	1.987	1.650	1.451,0	106,57	88,41	78,09	60,00	48,61	
Kacang panjang	2.250	2.715	2.950	3.235	3.650	2.511	2.737	2.425	2.470	1.944,6	111,58	100,82	82,20	76,35	53,28	
Cabe besar	1.750	1.800	2.225	2.715	2.900	2.009	2.160	2.003	1.650	1.330,0	114,82	119,99	90,03	60,77	45,86	
Bayam	1.845	2.015	2.710	2.815	3.225	1.528	1.733	1.692	1.477,9	1.428,8	82,81	86,00	62,45	52,50	44,30	
Durian	13.500	14.250	14.500	15.000	15.500	14.847	15.196	15.348	15.043	16.400	109,98	106,64	105,85	100,29	105,81	
Langsat	61.125	62.450	63.725	65.335	65.820	62.375	62.694	62.774	63.235	62.802	102,04	100,39	98,51	96,79	95,41	
Mangga	20.550	21.275	21.850	22.150	22.675	17.398	17.398	17.440	16.770	18.201	84,66	81,78	79,82	75,71	80,27	
Pisang	145.100	152.350	155.700	158.225	159.275	140.557	140.557	143.402	142.457	168.022	96,87	92,26	92,10	90,03	105,49	
Nangka	2.400	2.750	3.000	3.250	3.750	2.423	2.401	2.396	2.332	2.408	100,94	87,30	79,85	71,75	64,21	
Pepaya	3.725	4.010	4.350	4.815	5.250	2.513	2.513	2.496	2.416	2.528	67,46	62,66	57,37	50,18	48,16	
Sukun	37.500	39.250	40.500	42.250	45.500	38.790	38.790	39.163	39.163	39.312	103,44	98,83	96,70	92,69	86,40	
<b>Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan</b>																
Kakao	0	120	120	120	150	15.980	16.412	17.474	18.079	12.233	106,53	136,8	145,6	15065,8 3	8155,33	
Kelapa Dalam	1.100	1.152	1.183	1.230	1.261	11.100	10.697	10.895	12.204	12.785..21 3	1009,09	928,53	920,96	992,20	1013894 ,77	

Kopi	400	400	420	480	490	285	269	285	275	277.651	71,25	67,25	67,86	57,29	56663,4 7	
Kemiri	9.000	2.700	2.750	2.750	2.800	9.453	2.916	2.918	2.974	2.998.507	105,03	108,00	106,11	108,15	107089, 54	
Jambu Mete	348	348	348	349	352	2.854	2.168	2.175	2.199	1.479.901	820,11	622,99	625,00	630,09	420426,4 2	
Cengkeh	1.720	2.100	3.500	4.000	4.000.000	1.811	76	90	152	152.033	105,29	104,62	107,69	118,70	118,61	
Lada	1.700	100	100	100	100	1.811	76	90	152	152.033	106,53	76,00	90,00	152,00	152033,0 0	
Pala	0,5	0,5	10	1.000	7.000	1	0,71	12	12.869	12.676	200,00	142,00	120,00	1286,90	181,09	
Tebu Rakyat	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	2.969	50.248,2 0	40.834,5	36.239	40.133,700	49,48	837,47	680,58	603,98	668,90	
Tembakau (kg/ha)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	535	331,46	374	373	530,37	107,00	110,49	124,67	106,57	132,59	
Kapas	100	150	150	150	100	119	168	168	120	76,94	119,00	112,00	112,00	80,00	76,94	
Jahe	244	115	126	128	1.500	254	120	131	133		104,10	104,35	103,97	103,91	81244,67	
Kunyit	822	128	290	241	7.000	856	133,1	303	252	-	104,14	103,98	104,48	104,56	13251,03	
Kencur	22	0,8	1,3	1,3	10	23	0,9	1,4	1,4	-	104,55	112,50	107,69	107,69	122000,0 0	
Sereh	105	100	113	105	-	109	104,7	118	109	-	103,81	104,70	104,42	103,81		
Temulawak	13	15	15	20	2.000	14	16,2	16	21	-	107,69	108,00	106,67	105,00	1231,20	
Lempuyang	10	10	10	11	3.000	11	11,2	11	12	-	110,00	112,00	110,00	109,09	132,07	
Lengkuas	220	211	268	250	3.000	230	220	280	259	-	104,55	104,27	104,48	103,60	13305,73	
Wijen	139	132	132	133	138	145	137,5	138	139	144,14	104,32	104,17	104,55	104,51	104,45	
Nilam	62	45	28	20	21	65	46,4	30	21	22,45	104,84	103,11	107,14	105,00	106,90	

Tabel 2.4.2.  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone TA. 2013 – 2018

Uraian *	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2013 – 2018					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19
Pendapatan																	
- DAK	6.290.711.860	5.380.296.000	27.318.800.000	4.705.287.000	17.452.117.000	6.047.560.860	5.380.296.000	27.318.800.000	4.560.142.000	17.447.535.000	96	100	100	97	100		
- PAD	-	-	-	-	-					75.000.000							
Total Belanja	11.015.025.610	15.896.523.800	12.000.000.000	18.578.907.200	34.775.560.000	13.315.788.762	17.289.123.250	40.417.800.000	19.670.502.900	36.018.830.000	120,89	108,76	336,82	105,88	103,58		
Belanja Pegawai	319.930.000	217.700.000	413.750.000	636.050.000	864.200.000	664.630.000	227.150.000	670.850.000	738.000.000	850.100.000	207,74	104,34	162,14	116,03	98,37	-	(0,225)
Belanja Barang dan Jasa	784.630.000	4.668.824.300	8.638.850.000	8.638.850.000	17.637.432.200	33.310.810.000	681.537.902	4.177.097.300	36.166.577.500	17.767.224.200	86,86	89,47	418,65		103,48	-	74,425
Belanja Modal	9.910.465.610	11.009.999.500	2.947.400.000	305.425.000	600.550.000	11.969.620.860	12.884.875.950	3.580.372.500	1.165.278.700	700.324.800	120,78	117,03	121,48	381,53	116,61	-	36,332

**Tabel 2.4.3. Capaian Tanam, Panen, Produksi, Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan  
Tahun 2013-2017**

No	Komoditi	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>TANAMAN PANGAN</b>						
1	PADI					
	- Luas Tanam (Ha)	143,355	170,791	155,364	241,945	233,195
	- Luas Panen (Ha)	131,035	155,883	170,359	182,906	208,710
	- Produksi (Ton)	777,731	885,427	983,219	1,058,812	1,216,759
	- Produktivitas (Kw/Ha)	59.35	56.80	57.71	57.89	58.30
2	JAGUNG					
	- Luas Tanam (Ha)	30,190	56,459	45,660	77,274	80,442
	- Luas Panen (Ha)	24,657	39,310	50,934	67,824	76,431
	- Produksi (Ton)	136,309	213,391	284,070	379,789	424,441
	- Produktivitas (Kw/Ha)	55.28	54.28	55.77	56.00	55.53
3	KEDELAI					
	- Luas Tanam (Ha)	15,955	17,395	30,776	9,270	5,406
	- Luas Panen (Ha)	9,391	17,936	15,465	29,141	6,741
	- Produksi (Ton)	17,615	33,267	28,548	53,881	12,959
	- Produktivitas (Kw/Ha)	18.76	18.55	18.46	18.49	19.25
4	KACANG TANAH					
	- Luas Tanam (Ha)	8,722	12,596	1,797	4,459	3,025
	- Luas Panen (Ha)	2,105	11,998	9,639	7,806	1,087
	- Produksi (Ton)	3,091	20,572	16,953	13,808	1,968
	- Produktivitas (Kw/Ha)	14.68	17.15	17.59	17.69	18.11
5	KACANG HIJAU					
	- Luas Tanam (Ha)	2,453	3,324	793	801	673
	- Luas Panen (Ha)	6,223	4,056	1,065	1,065	567
	- Produksi (Ton)	11,229	5,588	1,487	1,766	704
	- Produktivitas (Kw/Ha)	18.04	13.78	13.96	15.00	12.42

6	UBI KAYU					
	- Luas Tanam (Ha)	301	785	238	318	434
	- Luas Panen (Ha)	483	738	364	289	315
	- Produksi (Ton)	4,789	7,094	3,499	3,499	2,958
	- Produktivitas (Kw/Ha)	99.14	96.12	96.13	90.52	93.89
7	UBI JALAR					
	- Luas Tanam (Ha)	963	646	783	1,830	971
	- Luas Panen (Ha)	484	663	276	1,148	609
	- Produksi (Ton)	4,018	5,439	2,224	9,287	4,918
	- Produktivitas (Kw/Ha)	83.01	82.03	80.58	80.90	80.76
TANAMAN HORTIKULTURA						
1	BAWANG MERAH					
	- Luas Panen (Ha)	10	10	172	178	242
	- Produksi (Ton)	581	2,207	12,246	1,406	2,002.9
	- Produktivitas (Kw/Ha)	58.10	220.70	71.20	7.90	8.3
2	TOMAT					
	- Luas Panen (Ha)	529	530	503	452	348
	- Produksi (Ton)	19,449	19,893	19,874	1,650	1,451
	- Produktivitas (Kw/Ha)	36.77	37.53	39.51	3.65	4.2
3	KACANG PANJANG					
	- Luas Panen (Ha)	522	534	515	510.00	392
	- Produksi (Ton)	25,105	27,373	24,248	2,470	1,944.6
	- Produktivitas (Kw/Ha)	48.09	51.26	47.08	4.84	5.0
4	CABE BESAR					
	- Luas Panen (Ha)	552	556	492	461	332
	- Produksi (Ton)	20,094	21,598	20,032	1,650	1,330
	- Produktivitas (Kw/Ha)	36.40	38.85	40.72	3.58	4.0
5	BAYAM					
	- Luas Panen (Ha)	563	568	545	466	406
	- Produksi (Ton)	15,278	17,330	16,923	1,478	1,428.8
	- Produktivitas (Kw/Ha)	27.14	30.51	31.05	3.17	3.52
6	DURIAN					
	- Luas Panen (Phn)	37,745	38,219	38,550	38,550	38,550
	- Produksi (Ton)	14,847	15,196	15,348	15,043	16,400
	- Produktivitas (Kw/Ha)	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40

7	LANGSAT					
	- Luas Panen (Phn)	157,911	158,556	158,613	158,514	158,605
	- Produksi (Ton)	62,375	62,694	62,774	63,235	68,802
	- Produktivitas (Kw/Ha)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
8	MANGGA					
	- Luas Panen (Phn)	461,951	461,951	463,281	436,123	463,806
	- Produksi (Ton)	173,982	173,982	174,396	167,698	182,006
	- Produktivitas (Kw/Ha)	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39
9	PISANG					
	- Luas Panen (Phn)	620,923	620,923	627,174	627,174	627,174
	- Produksi (Ton)	140,557	140,557	143,402	142,457	168,022
	- Produktivitas (Kw/Ha)	0.23	0.23	0.23	0.23	0.27
10	NANGKA					
	- Luas Panen (Phn)	54,443	54,389	54,389	54,389	54,389
	- Produksi (Ton)	24,226	24,007	23,955	23,319	24,077
	- Produktivitas (Kw/Ha)	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
11	PEPAYA					
	- Luas Panen (Phn)	46,548	46,548	46,581	45,598	45,597
	- Produksi (Ton)	25,128	25,128	24,956	24,164	25,282
	- Produktivitas (Kw/Ha)	0.54	0.54	0.54	0.53	0.55
12	SUKUN					
	- Luas Panen (Phn)	70,626	70,626	71,019	70,989	71,064
	- Produksi (Ton)	38,790	38,790	39,163	38,708	39,312
	- Produktivitas (Kw/Ha)	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
TANAMAN PERKEBUNAN						
1	KAKAO					
	- Luas Panen (Ha)	30,705	30,615	30,705	30,705	28,355
	- Produksi (Ton)	15,980	16,412	16,412	18,079	12,233
	- Produktivitas (Kg/Ha)	0.52	0.54	0.53	0.59	0.43
2	KELAPA DALAM					
	- Luas Panen (Ha)	12,082	12,082	12,333	12,363	12,385
	- Produksi (Ton)	11,100	10,696	10,895	12,204	12,785
	- Produktivitas (Kg/Ha)	0.92	0.89	0.88	0.99	1.03

3	KOPI					
	- Luas Panen (Ha)	1,026	1,026	1,044	1,037	1,020
	- Produksi (Ton)	285	269	269	275	277
	- Produktivitas (Kg/Ha)	0.28	0.26	0.26	0.27	0.27
5	JAMBU METE					
	- Luas Panen (Ha)	8,222	8,222	6,488	6,488	4,643
	- Produksi (Ton)	2,854	2,168	2,168	2,199	1,479
	- Produktivitas (Kg/Ha)	0.35	0.26	0.33	0.34	0.32
6	CENGKEH					
	- Luas Panen (Ha)	-	7,016	7,446	9,046	9,246
	- Produksi (Ton)	-	2,197	2,197	4,748	4,744
	- Produktivitas (Kg/Ha)	-	0.31	0.30	0.52	0.51
9	TEBU RAKYAT					
	- Luas Panen (Ha)	8,507	1,009	906	909	911
	- Produksi (Ton)	24,186	50,248	7,035	36,238	4,013
	- Produktivitas (Kg/Ha)	2.84	49.80	7.76	39.87	4.41
10	TEMBAKAU					
	- Luas Panen (Ha)	-	547	579	579	780
	- Produksi (Ton)	-	331	374	373	530
	- Produktivitas (Kg/Ha)	-	0.61	0.65	0.64	0.68
11	KAPAS					
	- Luas Panen (Ha)	-	1,147	1,147	250	203
	- Produksi (Ton)	-	168	168	120	76
	- Produktivitas (Kg/Ha)	-	0.15	0.15	0.48	0.37

## 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone

Analisis terhadap Rencana Strategis Kementerian Pertanian dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan tujuan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan pada renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone terhadap sasaran Renstra Provinsi Sulawesi Selatan.



Dalam pelaksanaan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Bone dalam 5 (lima) tahun kedepan terdapat beberapa tantangan dan peluang.

#### **2.5.1 Tantangan**

- a. Kesuburan tanah semakin menurun
- b. Alih fungsi lahan semakin meningkat
- c. Dampak perubahan iklim akibat pemanasan global
- d. Daya saing komoditas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan masih rendah
- e. Minat generasi muda untuk menjalankan usahatani tanaman pangan dan hortikultura semakin menurun
- f. Menguatnya kontrol sosial masyarakat
- g. Keadilan dan kesetaraan gender belum sepenuhnya dipahami dan belum optimal diaplikasikan
- h. Masih rendahnya SDM petani dalam mengaplikasikan sarana dan prasarana seperti alat mesin pertanian, sarana pasca panen dan sarana perhubungan

#### **2.5.2. Peluang,**

- a. Ketahanan perekonomian daerah yang baik
- b. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bone
- c. Peraturan perundang-undangan yang mendukung pembangunan pertanian
- d. Tersedianya jasa perbankan dalam pembiayaan usaha tani
- e. Kesesuaian lahan, budaya dan agroklimat / musim tanam yang variatif
- f. Adopsi teknologi pertanian oleh petani semakin meningkat
- g. Terbukanya peluang pasar produk tanaman pangan hortikultura dan Perkebunan baik ditingkat regional, nasional maupun internasional

Secara garis besar kondisi sumberdaya Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bone yang diinginkan dalam lima tahun mendatang adalah makin membaiknya kualitas sumberdaya pertanian serta meningkatnya capaian sasaran produksi, produktifitas hasil pertanian dengan Indikator membaiknya kualitas sumberdaya pertanian adalah upaya-upaya inovasi penerapan teknologi, optimalisasi lahan, pengembangan sarana dan prasarana jaringan air, dan jalan usaha tani ( JUT ) Sedangkan indikator meningkatnya kontribusi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan terhadap perekonomian daerah berupa pendapatan domestik rakyat bruto (PDRB), penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha masyarakat, serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup termasuk dalam konteks mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS**

### **PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone**

Analisis isu – isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan untuk melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan tanaman pangan hortikultura dan perkebunan karena dampaknya yang signifikan di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis dapat diperoleh melalui analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman di masa lima tahun mendatang.

Sesuai dengan hasil analisis pencapaian kinerja serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone, dapat diidentifikasi permasalahan – permasalahan pelayanan sebagai berikut :

1. Belum memadainya kebijakan pemerintah yang berpihak kepada petani, seperti kebijakan subsidi benih, pupuk atau kredit pertanaman
2. Kurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani
3. Makin besarnya tuntutan standarisasi produk hasil pertanian

4. Belum maksimalnya pengelolaan usaha tani yang berbasis agribisnis
5. Masih terbatasnya kompetensi petani dalam hal peningkatan teknologi pertanian
6. Makin besarnya tuntutan standarisasi produk hasil pertanian
7. Tuntutan kandungan pangan yang tidak berbahaya dan kendali residu bahan kimia
8. Terus berlangsungnya alih fungsi lahan
9. Rendahnya akses petani terhadap permodalan
10. Masih adanya pertanaman hambur yang dilakukan oleh petani
11. Masih terbatasnya sarana pasca panen yang ada sehingga hasil panen kurang berkualitas
12. Tidak adanya jaminan harga terutama untuk komoditi kedelai sehingga pada saat panen raya harga kedelai ditingkat produsen sangat rendah
13. Masih kurangnya modal sebagian petani dalam menerapkan PTT
14. Rendahnya produksi dan produktivitas
15. Terbatasnya petugas/penyuluh yang berlatar belakang perkebunan
16. Belum diterapkannya oleh kelompok tani paket teknologi spesifik lokasi
17. Belum optimalnya peran kelompok tani sebagai unit produksi
18. Belum optimalnya pengembangan teknologi spesifik lokasi dengan usaha tani yang ramah lingkungan
19. Penanganan pasca panen yang masih rendah
20. Masih rendahnya kualitas SDM aparat dan kemampuan petani sebagai pelaku agribisnis
21. Masih rendahnya produksi perkebunan.

Hasil identifikasi permasalahan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.1. Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	External (Diluar (Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 .Aspek Manusia	Jumlah pegawai Diperta sebanyak 156 orang	Orang	Tersedianya SDM Aparat yang cukup dan berkualitas	Meningkatnya pesaingan dlm perdagangan hsl bahan baku TP dan Industri	Belum optimalnya bimbingan penyuluh ke petani
2. Aspek topografi	Luas Lahan Sawah adalah 112.968 ha	Ha	Tersedianya Potensi Areal Pengembangan	Tingginya harga Saprodi termasuk benih an pupuk.	Belum optimalnya penerapan Infrastruktur
3. Aspek Teknis	Jumlah Tenaga kerja petani sebesar 133.825	Orang	Tersedianya Tenaga Kerja yang cukup	Kemajuan teknologi Semakin pesat	Terbatasnya Tenaga terampil
4.Aspek Teknis	Produktivitas TP khususnya padi dicapai 5 sd 6 ton perhektar.	Kw/ha	Usaha Tani Tan.Pangan Menguntungkan	Adanya gangguan OPT dan bencana alam	Produktivitas tan.pangan masih rendah

### 3.2 Telahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Bone sesuai dengan RPJMD Kabupaten tahun 2018 – 2023 adalah **Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera.**

- a. **Mandiri** adalah kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh – sungguh secara bertahap mapu mengurangi ketergantungan terhadap pihak – pihak lain namun tetap melakukan kerja sama dengan daerah – daerah lain yang saling menguntungkan.

- b. **Berdaya Saing** adalah terwujudnya kemampuan masyarakat kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif dan kompetitif yang berbasis sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.
- c. **Sejahtera** adalah semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sedangkan Misi di dalam dokumen RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perspektif lima tahun ke depan.

Dengan pemahaman tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi, maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Tabel 3.2.1. Keterkaitan antara rumusan misi dengan pokok visi

No.	Misi	Pokok Visi
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).	Mandiri
2.	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.	Mandiri/Sejahtera
3.	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.	Sejahtera
4.	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.	Mandiri
5.	Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.	Berdaya Saing
6.	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Sejahtera

Dari misi tersebut Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan berkontribusi terhadap capaian misi tiga yaitu mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sejalan dengan arah pembangunan pertanian yang telah direncanakan dan dalam upaya mencapai target sasaran yang ditetapkan, strategi pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Kementerian Pertanian dan Renstra Provinsi adalah

1. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
2. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
3. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
4. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

5. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
6. Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing
7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

### 3.3.1. Visi Kementerian Pertanian

Kabinet Kerja telah menetapkan visi yang harus diacu oleh Kementerian/Lembaga, yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, maka visi Kementerian Pertanian adalah :

**Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang  
Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi  
Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan  
Petani**

**Tabel 3.3.1. Pokok-pokok Visi Kementerian Pertanian**

Pokok – Pokok Visi	Makna Visi
Sistem pertanian bioindustri	Menyediakan bahan baku industri dengan meningkatkan pemanfaatan biomassa sebagai bagian upaya meningkatkan manfaat dan diversifikasi produk turunan
Berkelanjutan	Melanjutkan kebijakan, program dan kegiatan utama dari rencana strategis sebelumnya, dengan memperhatikan aspek kelestarian daya dukung lahan maupun lingkungan dan pengetahuan lokal



	sebagai faktor penting dalam perhitungan efisiensi
Beragam	Mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman sumberdaya, mengoptimalkan peluang pasar, mengurangi potensi dampak resiko, memenuhi meningkatnya preferensi konsumen akibat kenaikan pendapatan dan selera
Pangan sehat	Menyediakan produk yang aman, sehat dan halal
Produk bernilai tambah tinggi	Menciptakan produk pertanian yang mensejahterakan pelaku/petani, mendorong dihasilkannya aneka produk segar, produk olahan, produk turunan, produk samping, produk ikutan dan limbah
Sumberdaya lokal	Mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan kompetitif dan komparatif wilayah dan komoditas, meningkatkan efisiensi
Kedaulatan pangan	Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal
Kesejahteraan petani	Petani dan keluarganya hidup layak dari lahan dan usaha yang digelutinya

### 3.3.2. Misi Kementerian Pertanian

1. Mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan.

3. Mewujudkan kesejahteraan petani.

4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kaitan tata ruang dengan Restra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan berkaitan dengan produktifitas wilayah melalui intensifikasi lahan pertanian.

#### **3.4.1. Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Bone berdasarkan fungsi utama lahan. Secara makro penggunaan lahan dibagi kedalam beberapa kawasan yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penggunaan lahan pada kawasan lindung diarahkan pada pemantapan kawasan yang berfungsi lindung, sedangkan kawasan budidaya diarahkan untuk pengembangan kegiatan budidaya, baik permukiman/perkotaan maupun budidaya produktif (pertanian, perkebunan, industri, pariwisata dan sebagainya) sesuai arahan dalam RTRW.

#### **3.4.2. Arahan Pengembangan Wilayah**

Potensi pengembangan wilayah menurut arahan dalam RTRW di Kabupaten Bone, meliputi beberapa kawasan diantaranya adalah kawasan lindung dan kawasan budidaya.

##### **1. Kawasan Lindung**

Kawasan lindung yang ditetapkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup mencakup sumberdaya alam, sumber daya buatan. Penetapan kawasan lindung di wilayah Kabupaten Bone dijadikan titik tolak didalam pengembangan tata ruang wilayah yang berlandaskan pada

prinsip pembangunan berkelanjutan. Kawasan budidaya ditetapkan guna mengakomodasi kebutuhan ruang untuk kegiatan budidaya produksi maupun permukiman. Pengelolaan kawasan lindung yang ada perlu dimantapkan fungsinya karena terkait dengan kepentingan untuk meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air dan iklim pada wilayah belakangnya.

Pengelolaan kawasan lindung mengacu pada Kepres N0. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Penetapan kawasan lindung di Kabupaten Bone meliputi, Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya, Kawasan Rawan Bencana. Sesuai dengan kondisi wilayah, kawasan lindung yang perlu ditetapkan di Kabupaten Bone sesuai dengan kriterianya masing-masing adalah:

- Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, yang meliputi; kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air.
- Kawasan Perlindungan Setempat, yang terdiri dari; Sempadan Pantai, Sempadan Sungai, Sempadan di sekitar Waduk dan daerah tangkapan air, Kawasan sekitar Mata Air
- Kawasan Suaka Alam dan Cagar Alam, meliputi; Kawasan Pantai berhutan Bakau (mangrove), Kawasan Suaka Alam laut dan Perairan lainnya, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.

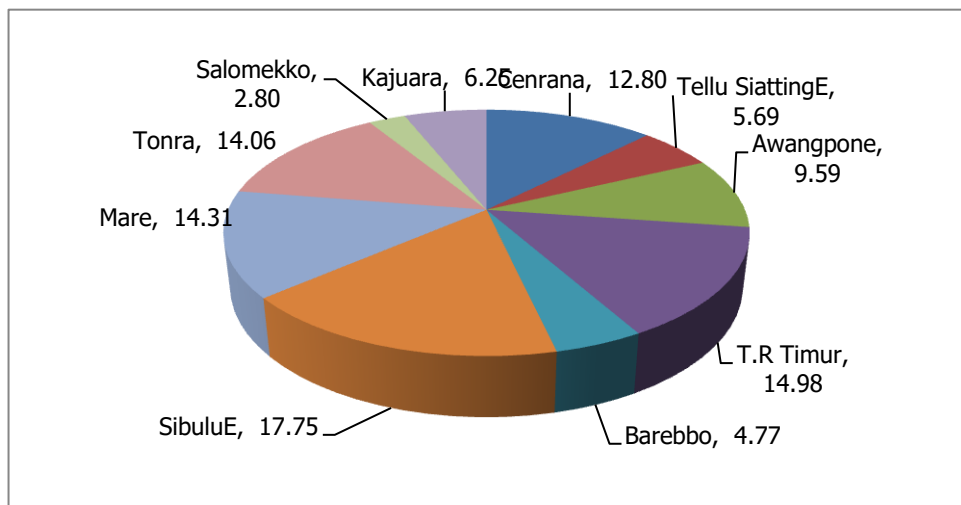
Kawasan lindung tersebar pada beberapa kecamatan dan luasnya bervariasi antar kecamatan. Luas kawasan lindung di wilayah Kabupaten Bone seluas 57.714 Ha (12.66%) dan tersebar di Kecamatan Lappariaja seluas 1.969 Ha, Kecamatan Lamuru seluas 31.500 Ha, Kecamatan Barebbo dengan luas 500 Ha, Kecamatan Cina 1.995 Ha, Kecamatan SibuluE seluas 3.375 Ha, Kecamatan Ponre dengan luas 1.181 Ha,

Kecamatan Mare 3.806 Ha, Kecamatan Tonra 1.969 Ha dan Kecamatan Bontocani 11.419 Ha. Upaya dan arahan untuk melestarikan kawasan hutan lindung yang perlu dipertahankan dan tingkatkan dapat dilakukan melalui kebijakan yang sifatnya mengikat, antara lain:

- Pemantapan fungsi lindung bagi kawasan lindung yang masih dipertahankan,
- Pengembalian fungsi lindung bagi kawasan lindung yang telah mengalami tumpang tindih dengan kegiatan budidaya dapat mengganggu fungsi lindung,
- Pelarangan/pencegahan kegiatan budidaya pada kawasan lindung yang telah ditetapkan,
- Pembatasan kegiatan budidaya yang ada dengan tindakan konservasi secara intensif,
- Pemindahan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung.

Kawasan suaka alam tersebar di beberapa kecamatan dan kondisi vegetasinya semakin berkurang. Kawasan Suaka Alam yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau, kondisi vegetasinya sudah semakin berkurang. Berdasarkan hasil pengukuran dilapangan, luas hutan mangrove adalah 102.98 H. Kawasan suaka alam terluas ada di Kecamatan SibuluE dan paling sedikit berada di Kecamatan Salomekko.

Gambar 2.4. Luas Kawasan Suaka Alam di Kabupaten Bone, 2017



Sumber: RTRW Kabupaten Bone, 2012-2032

Kawasan sekitar Mata Air perlu mendapat perlindungan dan pelestarian. Kebutuhan air bersih penduduk Kota Watampone dan sekitarnya sangat tergantung pada sumber Mata Air ini. Kemampuan cadangan air yang bersumber dari mata air, diperkirakan sebesar 293 Liter/Detik, dimana yang dimanfaatkan baru 36,86 persen (108 Detik/Liter). Sumber mata air tersebar di 8 titik lokasi (Wollangi, Batu-Batu, Abbala, Ceppaga, Lamuru, Palattae, Panyili dan Waetuo). Kawasan di sekitar Danau/Waduk/Tangkapan Air perlu mendapat perlindungan. Kawasan ini yang sifatnya setempat berfungsi untuk mempertahankan kelestarian lingkungan. Luas wilayah di kawasan ini meliputi Bendungan Salomekko (1.722 Ha) dan Waduk Paropo (2.300 Ha), pengembangan Waduk Sanrego (10.000 Ha), Paccapaseng (2.000 Ha), Waru-Waru (2.300 Ha), Ponre-Ponre (10.000 Ha), Danau Ujung (450 Ha) dan daerah tangkapan Air UloE (800 Ha). Wilayah ini merupakan kawasan dengan penanganan perlindungan delineasi di sekeliling tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik antara 50 Meter sampai 100 Meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan

perlindungan ini sangat potensial untuk pengairan lahan persawahan, sumber air baku, industri pariwisata dan lain-lain. Ke depan, upaya rehabilitasi/penanganan dan pengelolaan DAS (hulu-hilir) sangat penting dengan melibatkan beberapa kabupaten di sekitar Kabupaten Bone secara koordinatif dengan membentuk regulasi melindungi kawasan tersebut dari kerusakan.

Pemanfaatan ruang dalam rangka pengembangan wilayah, diserasikan dengan kemampuan dan daya dukung wilayahnya. Dikaitkan dengan kondisi pemanfaatan ruang eksisting, delineasi kawasan lindung kemungkinan akan berhadapan dengan permasalahan tumpang tindih dengan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindungnya. Oleh karena itu diperlukan kebijaksanaan pengendaliannya agar tidak mengganggu fungsi lindung yang telah ditetapkan. Di samping untuk mencegah erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjadi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan. Beberapa kasus permasalahan yang terjadi dan perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Bone adalah:

- Perambahan atau intervensi hutan lindung oleh masyarakat untuk kegiatan perlandangan berpindah, sehingga menyebabkan semakin meluasnya lahan-lahan kritis,
- Kondisi eksisting pada kawasan hutan lindung yang ternyata sudah tidak mempunyai fungsi lindung lagi,
- Kegiatan budidaya yang telah lama berkembang yang menurut kriteria fisik merupakan kawasan lindung,
- dan permukiman yang telah berkembang lama di dalam kawasan lindung.

## **2. Kawasan Budidaya**

Kawasan budidaya secara umum merupakan kawasan di luar yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam dan manusia serta sumberdaya buatan. Kawasan ini perlu dimanfaatkan secara terencana dan terarah, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia. Kawasan budidaya yang akan diarahkan pengembangannya sesuai dengan potensi terdiri dari dua sub-kawasan budidaya, yaitu:

- Sub Kawasan Budidaya Pertanian, yang mencakup; Kawasan pertanian tanaman pangan (lahan basah dan kering), Kawasan Tanaman Tahunan/perkebunan, Kawasan Peternakan dan Perikanan
- Sub Kawasan Budidaya Bukan Pertanian, yang mencakup; Kawasan Permukiman (perkotaan dan perdesaan), Kawasan Industri, Pariwisata, Kawasan Pertambangan dan Mineral.

Kriteria untuk mendelineasi kawasan/sub kawasan budidaya secara umum lebih didasarkan pada faktor kesesuaian lahan dan kemampuan lahan untuk dikembangkan. Kawasan budidaya di wilayah Kabupaten Bone seluas 398.186 Ha atau 87.34 persen dari total luas wilayah. Klasifikasi kawasan budidaya seperti diuraikan di atas terutama dikaitkan dengan fungsi utama pemanfaatan ruangnya dalam menampung kebutuhan penduduk, baik untuk kegiatan produktif maupun permukiman.

### **2.1. Sub Kawasan Budidaya Pertanian**

Arahan pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan/sub kawasan budidaya pertanian dalam jangka panjang didasarkan pada potensi, kesesuaian lahan dan kemampuan lahan. Sektor pertanian yang dapat

dikembangkan di Wilayah Kabupaten Bone terdiri dari sub sektor pertanian tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan dan sub sektor Perikanan. Dalam pengembangan kawasan pertanian, kebijaksanaan yang ditempuh adalah:

#### **2.1.1. Pertanian Tanaman Pangan**

Kebijaksanaan pemanfaatan ruang untuk mewujudkan pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan (lahan basah dan kering) yang dilakukan sesuai dengan potensinya adalah:

- Perluasan areal persawahan baru/pertanian tanaman pangan lahan basah,
- Pengembangan prasarana pengairan untuk mendukung pengembangan pertanian tanaman pangan lahan basah,
- Pengendalian kegiatan lain yang mengkonversi lahan pertanian (alih fungsi lahan) yang relatif subur dan potensial secara tegas

#### **2.1.2. Pertanian Tanaman Tahunan/Tanaman Keras (perkebunan)**

Kebijaksanaan pemanfaatannya ruangnya untuk mewujudkan pengembangan kawasan pertanian tanaman tahunan adalah:

- Pengembangan tanaman tahunan/perkebunan sesuai dengan potensi/kesesuaian lahannya secara optimal,
- Pemanfaatan lahan untuk tanaman tahunan/perkebunan harus disertai dengan tindakan konservasi tanah yang baik,
- Pemanfaatan lahan-lahan kritis dengan komoditas perkebunan yang berfungsi melindungi tata air dan tanah,
- Khusus untuk pengembangan lahan perkebunan tebu yang telah dikelola dengan melibatkan BUMN (PTPN XIV), perlu



memperhatikan pemberdayaan masyarakat di sekitarnya, dengan berperan langsung dalam proses produksi dan pasca produksi.

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Permendagri 86/2017 mendefinisikan isu strategis sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Rumusan isu strategis dimaksud harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.

#### A. Isu Strategis Global

- *Sustainable Development Goals (SDGs)*

*Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan isu penting dalam pembangunan global saat ini dan 15 tahun ke depan (2016-2030). Secara konseptual, SDGs adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang

pembangunan ekonomi di masa mendatang. SDGs ini terdiri atas 17 sasaran, 169 target, dan 241 indikator pembangunan.

Untuk mencapai tujuan SDGs tahun 2030 diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya pemerintah (nasional dan daerah), masyarakat sipil, akademis, media, sektor swasta dan lembaga donor. Secara kolektif kelompok ini akan memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia.

Di dalam Permendagri 86/2017 disebutkan secara eksplisit mengenai pentingnya mengintegrasikan SDGs ke dalam dokumen RPJMD untuk memastikan bahwa semua agenda-agenda SDGs benar-benar terakomodir di dalam desain perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Pencapaian SDGs harus menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah.

- **Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan**

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional dan daerah menjadi salah satu isu penting untuk memastikan bahwa gender benar-benar memberi warna dalam perumusan perencanaan dan kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat, dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

- **Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)**

Terhitung sejak tahun 2015, negara-negara ASEAN telah bersepakat untuk memberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang pada intinya tidak ada lagi

hambatan terhadap arus barang dan jasa, manusia dan modal antara sesama negara ASEAN. Liberalisasi perdagangan ini akan berimbas pada meningkatnya intensitas persaingan di pasar domestik akibat membanjirnya produk-produk dari negara-negara ASEAN serta meningkatnya persaingan di pasar ekspor karena tidak adanya lagi hambatan dalam perdagangan internasional lingkup ASEAN. Kabupaten Bone tak terkecuali, akan menerima dampak atas kondisi ini, dan karena itu, perlu mengantisipasinya dengan meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, produktifitas, dan kemampuan berinovasi dari para pelaku ekonomi lokal.

- **Pemanasan Global (*Global Warming*)**

Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan Bumi. *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menyimpulkan bahwa, sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi merupakan ancaman yang serius bagi planet bumi dan seluruh makhluk di dalamnya, sehingga perlu langkah dan upaya terpadu dalam penanggulangan dan pencegahan serta pengawasan sebab dan dampak yang dihasilkan oleh pemanasan global tersebut, yang salah satu penyebabnya adalah pembentukan beberapa jenis gas rumah kaca yang dihasilkan oleh peternakan, pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor, pabrik-pabrik modern, serta pembangkit tenaga listrik dan lainnya.

## **B. Isu Strategis Nasional**

- **Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Desentralisasi dan otonomi daerah yang sudah berjalan hampir dua dasawarsa terakhir, bukan hanya berimplikasi pada besarnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sumberdaya yang dimilikinya, tetapi juga menuntut tumbuhnya potensi sumberdaya pembangunan daerah yang lebih mandiri dalam jangka panjang.

Kemandirian pembangunan daerah dalam era desentralisasi dan otonomi daerah sejatinya diperlukan untuk memperkuat pembangunan nasional. Untuk itu diperlukan pelaksanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, bersinergi, efisien dan menjamin terkelolanya sumber daya alam secara maksimal dalam rangka pemerataan, keadilan sosial yang memperkuat sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam semangat NKRI. Salah satu implikasi penting dari desentralisasi dan otonomi daerah adalah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan melalui penguatan kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah agar dapat bekerja secara profesional, dan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- **Standar Pelayanan Minimum (SPM)**

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun SPM pada 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, dan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Untuk setiap jenis urusan, pemerintah daerah perlu menetapkan jenis, mutu, dan penerima pelayanan dasar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mendesain perencanaan enam urusan wajib pelayanan dasar tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip SPM, agar pelayanan publik dapat lebih dioptimalkan. Seperti halnya SDGs, pencapaian SPM harus menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah.

- **Pembangunan Inklusif**

Sejak tahun 2018, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif yang terdiri atas tiga pilar, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan perluasan akses dan kesempatan. Indeks ini dibuat untuk memastikan bahwa desain pembangunan nasional benar-benar bersifat inklusif. Pemerintah daerah juga didorong untuk mendesain pembangunan daerahnya sesuai dengan pilar pembangunan inklusif, terutama di daerah dengan tingkat

ketimpangan dan kemiskinan yang tinggi. Mengingat angka kemiskinan di Kabupaten Bone masih relatif tinggi, pemerintah Kabupaten Bone perlu memastikan agar pembangunan daerahnya bisa lebih inklusif. Desain perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bone harus berdimensi ganda, di satu sisi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan di sisi lain, tetap mampu menciptakan pemerataan pendapatan dan pengurangan angka kemiskinan.

- **Penanggulangan Kemiskinan**

Pemerintah pusat menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengurangi angka kemiskinan. Masalah kemiskinan dianggap sebagai salah satu penghambat proses pembangunan. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menanggulangi kemiskinan, diantaranya memperkuat kelembagaan, mendesaikan kebijakan, mengkoordinasikan program, dan mengalokasikan anggaran yang signifikan. Pada saat yang sama, pemerintah pusat juga mendorong pemerintah daerah untuk bersinergi dalam memerangi kemiskinan. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat mendesain berbagai program yang diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan.

- **Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola**

Seiring dengan perkembangan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang semakin dinamis, terbuka, maka dibutuhkan sebuah birokrasi yang kuat, terpercaya, dan akuntabel. Dalam perkembangan penataan birokrasi pemerintah Kabupaten Bone, masih menghadapi beberapa permasalahan pada aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, dan penataan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan penanganan secara mendasar, terencana dan sistematis. Selain penataan kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kualitas aparat juga menjadi sebuah keharusan untuk menjamin peningkatan kapasitas dan profesionalisme pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik yang juga semakin kompleks. Agenda-agenda yang terkait dengan

reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan harus benar-benar tercermin di dalam desain perencanaan pembangunan daerah.

- **Pembangunan Kawasan Perdesaan**

Sekitar dua tahun lalu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pembangunan Kawasan Perdesaan menerbitkan Permendesa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Tujuan pembangunan kawasan perdesaan adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Prioritas pembangunan kawasan perdesaan terletak pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan. Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan mencakup pengusulan kawasan perdesaan, penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, dan pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

### **C. Isu Strategis Regional (Pulau Sulawesi)**

- **Konektivitas Wilayah**

Pulau Sulawesi merupakan suatu entitas ekonomi yang diharapkan memiliki konektivitas antar wilayah melalui kegiatan industri, perdagangan, dan investasi. Integrasi jaringan transportasi darat, laut, dan udara menjadi faktor yang sangat strategis dalam mendukung konektivitas antar wilayah tersebut. Kabupaten Bone berada dalam jalur transportasi darat dan laut yang menghubungkan antara Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara. Posisi strategis ini harus dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten Bone untuk meningkatkan arus mobilitas barang dan orang sehingga pada gilirannya dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi daerah.

- **Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Wilayah Sulawesi dikaruniai keragaman hayati yang cukup tinggi dan unik yang berbeda dengan flora dan fauna di wilayah lainnya di Indonesia. Spesies endemik sejumlah flora dan fauna Pulau Sulawesi ini harus dapat dilestarikan dengan baik, dimana setiap pemerintah daerah harus berperan dan berkomitmen dalam program pembangunannya masing-masing. Eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan dapat mengancam potensi tersebut. Di sisi lain, wilayah ini memiliki kerawanan akan terjadinya bencana alam, terutama banjir dan tanah longsor, sehingga penanganan dan antisipasi dini secara terintegrasi penting dilakukan, bukan hanya dengan pemerintah pusat, tetapi juga antar pemerintah daerah.

#### **D. Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan**

- **Pembangunan Infrastruktur**

Ketersediaan infrastruktur dasar seperti prasarana jalan, jaringan irigasi, listrik dan air bersih di Provinsi Sulawesi Selatan masih perlu dioptimalkan. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi kawasan, selain terkait dengan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi, juga sangat terkait dengan investasi di daerah. Isu pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan masih bertumpu pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan jaringan kereta api, pengembangan pelabuhan laut, pembangunan waduk dan jaringan irigasi, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi.

- **Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan**

Selama satu dekade terakhir, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai isu strategis daerah. Sejak tahun 2008, pemerintah Sulawesi Selatan telah mengimplementasikan kebijakan pendidikan gratis dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua anak yang berada pada usia sekolah benar-benar duduk di bangku sekolah. Pada saat bersamaan, pemerintah Sulawesi Selatan juga

mengimplementasikan kebijakan kesehatan gratis dengan tujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, membantu meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan, dan meningkatkan cakupan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas serta jaringannya dan di rumah sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Selatan.



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### **4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone**

Tujuan dari pembangunan jangka menengah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian Tanaman pangan Hortikultura dan Perkebunan
2. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan daerah

#### **4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone**

Sasaran yang ditetapkan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Pertanian tanaman pangan Hortikultura dan Perkebunan
2. Meningkatnya produksi komoditas utama tanaman pangan hortikultura dan perkebunan
3. Meningkatnya produktivitas komoditas utama tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

Lebih jelas dapat dilihat tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal Tahun 2018	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
					Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP	CC	CC	CC	CC	BB	BB
2	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan	Kontribusi produksi pertanian terhadap PDRB (%)	49,37	49,37	49,37	49,37	49,37	49,37
			Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar (%)	49,21	49,21	49,25	49,30	49,40	49,45
			Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	46,55	48,88	51,29	53,86	56,55	59,93

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi**

Untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan tujuan dan sasaran maka ditetapkan strategi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas layanan pengelolaan administrasi dan proses perencanaan, pelaksanaan pelaporan serta monitoring dan evaluasi termasuk pelaporan pertanggung jawaban keuangan dan realisasi kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone
2. Peningkatan mutu produk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, penyediaan bahan baku ekspor, hasil produksi komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peningkatan profesionalisme kelembagaan pendukung usaha tani.

#### **5.2. Kebijakan**

1. Penyediaan dan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai
2. Peningkatan kwalitas SDM aparat Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone yang berintegritas
3. Penigkatan kwalitas dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone
4. Peningkatan pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban keuangan
5. Peningkatan kemampuan/keterampilan teknik budidaya, pengelola lahan, kelembagaan kemitraan, pengolahan hasil, pasca panen dan pemasaran.
6. Memperkuat kelembagaan petani melalui fasilitasi bimbingan dan pembinaan.
7. Meningkatkan dan memantapkan produksi melalui penyediaan air irigasi yang cukup, sarana produksi dan pengamanan pertanaman serta produksi.
8. Fasilitasi penggunaan sarana dan prasarana produksi, alat mesin dan pengendalian hama penyakit.

9. Peningkatan produksi, produktivitas dan intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi, integrasi pertanian, serta penggunaan benih/bibit unggul.
10. Pengembangan komoditas dengan peningkatan dukungan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
11. Mengembangkan industri pertanian perdesaan melalui pengolahan hasil, manajemen usaha dan penguatan sistem pemasaran.
12. Meningkatkan penyediaan bahan pangan.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone

VISI : “Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera			
MISI I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Peningkatan kualitas layanan pengelolaan administrasi dan proses perencanaan, pelaksanaan pelaporan serta monitoring dan evaluasi termasuk pelaporan pertanggung jawaban keuangan dan realisasi kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan dan Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai</li> <li>- Peningkatan kualitas SDM aparat Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone</li> <li>- Peningkatan kualitas Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan</li> <li>- Peningkatan pengelolaan Administrasi dan Pertanggungjawaban Keuangan</li> </ul>

MISI II : Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan	Peningkatan mutu produk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, penyediaan bahan baku ekspor, hasil produksi komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peningkatan profesionalisme kelembagaan pendukung usaha tani.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kemampuan / keterampilan teknik budidaya, pengelola Lahan, kelembagaan kemitraan, pengelolaan hasil, pasca panen dan pemasaran</li> <li>- Memperkuat kelembagaan petani melalui fasilitasi bimbingan dan pembinaan</li> <li>- Meningkatkan dan memantapkan produksi melalui penyediaan air irigasi yang cukup, sarana produksi dan pengamanan pertanaman serta produksi</li> <li>- Fasilitasi penggunaan sarana dan prasarana produksi, alat mesin dan pengendalian hama penyakit</li> <li>- Peningkatan produksi, produktivitas dan intensifikasi, rehabilitasi diversifikasi, integrasi pertanian, serta penggunaan benih/bibit unggul</li> <li>- Pengembangan komoditas dengan peningkatan dukungan terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup</li> <li>- Pengembangan industri pertanian pedesaan melalui pengelolaan hasil, manajemen usaha dan penguatan sistem pemasaran</li> <li>- Peningkatan penyediaan bahan pangan</li> </ul>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN**

#### **6.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Sesuai dengan Kebijakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone selama lima tahun ke depan, dan mengacu pada Agenda Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023, ditetapkan program kerja operasional sebagai berikut :

- A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- E. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Aparatur dan Keuangan
- F. Program Penunjang Pemerintahan Umum
- G. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- H. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan
- I. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
- J. Program Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan
- K. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
- L. Program Standarisasi Kualitas Bahan Baku
- M. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan berkelanjutan

## 6.2. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

### A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator : Tertibnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
- Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah luar daerah
- Pelaksanaan administrasi perkantoran

### B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator : Tersedianya sarana dan prasarana PNS lingkup Dinas Pertanian  
Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan mebeleur
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan pengembangan sistem informasi/aplikasi/website.

### C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator : Persentase peningkatan disiplin aparatur

- Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu

### D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

- Pendidikan dan pelatihan non formal



**E. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Aparatur dan Keuangan**

Indikator : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

**F. Program Penunjang Pemerintahan Umum**

Indikator : Jumlah Renstra, Renja, RKA, DPA yang disusun dan jumlah promosi yang terselenggara

- Penyusunan rencana perangkat daerah
- Promosi dan pameran pembangunan
- Pelaksanaan forum perangkat daerah

**F. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**

Indikator : Meningkatnya Pendapatan petani dalam rupiah/ha/tahun.

- Kegiatan Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
- Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan pelaku agribisnis melalui program IPDMIP, YESS, SMURF.
- Kegiatan Pembinaan Petani dan Pelaku Agribisnis
- Kegiatan Pemberdayaan Petani dan Pelaku Agribisnis
- Peningkatan kemampuan lembaga petani.

**G. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan**

Indikator : Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk tanaman pangan dan hortikultura dalam jumlah dan jenis yang cukup di masyarakat

- Kegiatan penyusunan statistik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
- Kegiatan analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan

- Kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil
- Kegiatan pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija melalui ketersediaan pupuk non subsidi
- Kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
- Kegiatan pengembangan pertanian pada lahan kering
- Pengembangan perbenihan/perbibitan.

#### **H. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan**

Indikator : Meningkatnya produksi, produktivitas tanaman pangan melalui penggunaan teknologi spesifik lokasi.

- Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (DAK)
- Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna
- Kegiatan pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan

#### **I. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan**

Indikator : Tersedianya kebutuhan bahan pangan/benih dalam jumlah dan jenis yang cukup di masyarakat .

- Kegiatan penyediaan Sarana produksi pertanian / perkebunan
- Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian
- Peremajaan intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan

**J. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian**

Indikator : Jumlah penyuluh yang terlatih

- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan
- Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan
- Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

**K. Program Standarisasi Kualitas Bahan Baku**

Indikator : Sarana dan prasarana yang tersedia

- Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi

**L. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan berkelanjutan**

Indikator : Meningkatnya produksi dan mutu hasil perkebunan

- Pengembangan bibit unggul berkelanjutan
- Pengembangan teknologi budidaya perkebunan.

**6.3. Kelompok sasaran**

Kelompok sasaran adalah aparaturnya dan masyarakat baik yang tergabung dalam kelompok tani maupun masyarakat lainnya.

**6.4. Pendanaan Indikatif.**

Total pendanaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone diperlukan biaya sebesar Rp. 788 milyar sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone Tahun 2019 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan			Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP	CC	CC	-	CC	-	CC	-	BB	-	BB	-	BB	-	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
		2.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	742,497	100	815,647	100	897,111	100	987,623	100	1,478,662	100	4,921,539	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening tagihan telpon, air dan listrik yang dibayar (rekening)	96	96	234,900	96	258,390	96	284,229	96	312,652	96	343,917.09	480	1,434,087.99	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
		07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun (kali)	260	1,008	11,000	1,008	11,000	1,008	12,000	1,008	14,000	1,008	16,000	5040	64,000.00	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran Media yang Menyediakan bahan bacaan (Kali)	84	84	30,000	84	33,000	84	36,300	84	39,930	84	435,600	420	574,830.00	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
		23	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti (kegiatan)	50	50	352,000	50	387,200	50	425,920	50	468,512	50	515,363	250	2,148,995.20	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
		24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah penunjang administrasi perkantoran (paket)	60	60	114,597	60	126,057	60	138,662	60	152,529	60	167,781	300	699,626.14	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
		2.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	100	357,744	100	893,518	100	57,526,270	100	63,318,897	100	69,680,288	100	191,776,717.80	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
		05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Unit)	2	-	-	10	500,000	10	600,000	15	700,000	15	800,000	50	2,600,000	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
		07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang tersedia (Paket)	2	5	19,360	5	21,296	5	23,425	5	25,768	5	28,344	25	118,193	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone

	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia (Paket)	13	4	123,530	4	135,883	4	149,471	4	164,418	4	180,859	20	754,161	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur kantor (jenis)	2	9	46,728	9	51,401	9	56,550,000	9	62,205,000	9	68,425,000	45	187,278,129	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan gedung kantor (Kegiatan)	1	1	38,726	1	42,599	1	46,800	1	51,480	1	56,628	5	236,233	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya setiap tahun (Paket)	172	172	125,000	182	137,500	192	151,250	207	166,375	222	183,012	975	763,137	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (Paket)	2	3	4,400	3	4,840	3	5,324	3	5,856	3	6,445	15	26,865	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
	2.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Cakupan realisasi pengadaan kebutuhan penunjang disiplin aparatur (%)	-	-	-	100	150,000	100	-	100	-	100	170,000	100	320,000	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
	05	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu (pasang)	-	-	-	300	150,000	-	-	-	-	315	170,000	615	320,000	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
	2.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)	100	100	40,000	100	44,000	100	48,400	100	53,240	100	58,564	100	244,204	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
	03	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, loka karya dan seminar (orang)	-	-	40,000	10	44,000	10	48,400	10	53,240	10	58,564	40	244,204	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
	2.01.06	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA APARATUR DAN KEUANGAN	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	6	28,575	36	31,433	36	34,575	36	38,000	36	41,800	150	174,383	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja perangkat daerah (dok)	7	7	28,575	7	31,433	7	34,575	7	38,000	7	41,800	35	174,383	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone

		2.01.08	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum (%)	100	100	110,000	100	123,000	100	136,800	100	151,480	100	167,128	100	688,408	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
		01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang tersusun (dok)	7	6	30,000	5	35,000	6	40,000	5	45,000	5	50,000	27	200,000	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
		03	Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah pameran/ Promosi yang terselenggara / diikuti (kegiatan)	5	5	80,000	5	88,000	5	96,800	5	106,480	5	117,128	25	488,408	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan			Kontribusi Produksi Pertanian terhadap PDRB (%)	49.37	49.37		49.37		49.37		49.37		49.37		49.37		Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
				Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar (%)	49.21	49.21		49.25		49.3		49.4		49.45		49.45			
				Cakupan Bina Kelompok Tani	9.39	9.99		10.98		11.99		12.99		13.98		13.98			
		2.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Persentase peningkatan pendapatan kelompok tani (%)	100	100	1,875,710	100	2,394,181	100	2,666,409	100	2,879,689	100	3,128,868	100	12,944,857	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
		01	Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah kelompok tani yang telah dilatih (klp)	45	45	75,000	50	80,000	60	85,000	75	90,000	100	95,000	330	425,000	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
		02	Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah Daerah Irigasi (DI), Kelompok P3A/GP3A yang mendapatkan pendampingan (Kegiatan)	27	12	1,540,000	12	1,600,000	12	1,700,000	12	1,800,000	12	1,900,000	60	8,540,000	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
		03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah kelompok tani yang dibina untuk mendapatkan kemampuan kelas (klp)	5434	1.359	120,000	1300	125,000	1300	150,000	1300	175,000	1534	200,000	5435.359	770,000	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
		06	Kegiatan Pembinaan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah peserta pelatihan petani / penyuluh swadaya (orang)	200	200	35,000	200	40,000	200	45,000	200	50,000	200	55,000	1000	225,000	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
		07	Pemberdayaan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah peserta SL - PHT (orang)	25	30	105,710	35	116,281	35	127,909	35	140,699	35	154,768	170	645,367	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone

2.01.16	08	Pengembangan Pasca Panen dan Produk Olahan Padi Palawija	Jumlah fasilitasi alat pasca panen padi palawija yang disediakan (unit)	-	-	-	13	89,500	13	89,500	13	89,500	13	89,500	52	358,000	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
	09	Pengembangan Pasca Panen dan Produk Olahan Hortikultura	Jumlah fasilitasi alat pasca panen hortikultura yang disediakan (unit)	-	-	-	14	100,000	28	220,000	42	183,240	65	239,600	149	742,840	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
	10	Pengembangan Pasca Panen dan Produk Olahan Perkebunan	Jumlah fasilitasi alat pasca panen perkebunan yang disediakan (unit)	-	-	-	11	243,400	9	249,000	9	351,250	9	395,000	38	1,238,650		
	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/ PERKEBUNAN	Jumlah Produksi :																
		- Padi (ton)	1,428,883	1,514,616			1,605,493		1,701,823		1,803,932		1,912,168		8,538.032			
		- Jagung (ton)	402,486	426,635			452,233		479,367		508,129		538,617		2,404,981			
		- Kedelai (ton)	13,047	13,830			14,660		15,539		16,472		1,760		62,261			
		- Bawang Merah (ton)	26	28			29		31		33		35		156			
		- Cabe (ton)	22	23			25		26		28		29		131			
		- Sukun (ton)	40	42			45		48		50		54		239			
		- Kelapa (ton)	14,282	14,421			14,560		14,669		14,838		14,973		73,461			
		- Kopi (ton)	319	338			358		380		403		427		1,906			
		- Kakao (ton)	10,692	11,185			11,687		12,172		12,665		13,158		60,867			
		- Cengkeh (ton)	4,949	5,098			5,246		5,394		5,546		5,690		26,974			
		- Lada (ton)	140	152			164		176		188		200		880			
		- Pala (ton)	19	23			27		31		35		46		162			
		- Tebu (ton)	-	42,042			43,543		45,045		46,546		48,048		225,224			
		- Tembakau (ton)	765	780			795		810		825		840		4,050			
	02	Penyusunan database potensi produksi pangan	Jumlah dokumen database potensi produksi pangan yang tersusun (buku)	1	1	250,000	1	300,000	1	350,000	1	400,000	1	450,000	5	1,750,000	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
	04	Kegiatan Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	Jumlah dokumen Database Kemiskinan yang tersusun (dokumen)	-	-	-	1	25,000	1	27,500	1	30,000	1	35,000	4	117,500	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
	12	Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil pertanian	Jumlah kelompok tani yang dibina dalam pengolahan hasil pertanian (Klp)	-	-	-	20	150,000	21	175,000	26	200,000	29	250,000	96	775,000	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
	13	Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	Jumlah kecamatan yang mendapatkan alokasi pupuk non subsidi (Kegiatan)	1	1	10,500,000	1	12,500,000	1	12,500,000	1	14,500,000	1	16,500,000	5	66,500,000	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone

	14	Peningkatan Produksi Padi	Jumlah sarana produksi padi yang diadakan (paket)	-	-	-	3	250,000	3	270,000	3	285,000	3	300,000	12	1,105,000	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
	15	Peningkatan Produksi Palawija	Luas lahan Pengembangan Palawija (Ha)	-	-	-	25	250,000	25	270,000	25	285,000	25	300,000	100	1,105,000	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
	16	Peningkatan produksi kacang dan umbi	Luas lahan Pengembangan Kabi (Ha)	25	-	-	25	300,000	25	350,000	25	350,000	25	450,000	100	1,450,000	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
	17	Kegiatan Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering	Jumlah Pohon induk yang bersertifikat (Varietas)	2	2	100,000	2	135,000	2	150,000	2	175,000	2	200,000	10	760,000	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
	20	Kegiatan Pengembangan Perbenihan / Perbibitan	Jumlah bantuan bibit sayuran dan buah - buahan (Pohon)	-	1380	34,000	1600	80,000	1825	109,500	1980	148,500	2180	218,000	8965	590,000	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
	26	Perluasan lahan sawah	Luas cetak sawah baru (Ha)	-	-		10	170,000	12	190,000	14	250,000	16	280,000	52	890,000	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
	27	Kegiatan Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mengikuti bimtek Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (klp)	35	35	880,000	37	968,000	40	1,064,800	40	1,171,280	45	1,288,408	197	5,372,488	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
			Jumlah luasan bantuan sarana produksi bawang merah, aneka cabai dan tanaman obat (Ha)	100	-	-	25	253,500	27	360,200	29	507,000	30	626,800	111	1,747,500	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
			Jumlah kelompok tani/petani yang mengikuti bimtek pemangkasan kakao (klp)	90	95	880,000	95	968,000	95	1,064,800	95	1,171,280	95	1,288,408	475	5,372,488	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
	28	Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	Jumlah Promosi Hasil Produksi Pertanian (Kegiatan)	2	2	250,000	2	270,000	2	300,000	2	350,000	2	370,000	10	1,540,000	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
2.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN / PERKEBUNAN	Indeks pertanian Padi (IP)	1,61	1,75	25,538,000	1,76	32,969,000	1,78%	34,063,600	1,79	158,360,000	1,80	174,170,000	1,91 %	468,470,353	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone	
02	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna (DAK + DAU)	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian (paket)	166	170	21,226,131	135	27,348,744	145	26,148,000	155	28,592,000	165	31,952,000	1070	135,266,875	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone	



		06	Kegiatan Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Modern Bercocok Tanam	Jumlah peserta pelatihan/ sosialisasi penerapan teknologi pertanian/ perkebunan (orang)	75	25	100,000	25	80,000	25	100,000	25	110,000	25	125,000	125	515,000	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
		07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi yang telah dilaksanakan (laporan)	4	4	118,876	4	130,763	4	143,839	4	158,250,000	4	174,045,000	20	332,688,478	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
		2.01. 19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN	Produktifitas :			1,019,622		1,105,262		1,205,262		1,280,262		1,365,262		5,975,670	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
				- Padi ( kw/ha )	59.03	62.57		66.33		70.31		74.52		79		352.73			
				- Jagung ( kw/ha )	55.89	59.24		62.8		66.57		70.56		74.79		333.96			
				- Kedelai ( Ton )	19.42	20.59		21.82		23.13		24.52		25.99		116.05			
				- Bawang Merah (kw/ha)	84.5	89.57		94.94		100.64		100.68		113.08		498.91			
				- Cabe besar ( kw/ha )	42.7	45.26		47.98		50.86		53.91		57.14		255.15			
				- sukun ( kw/ha )	0.6	0.64		0.67		0.71		0.71		0.8		3.53			
				- Kelapa ( kw/ha )	1.27	1.29		1.31		1.31		1.33		1.34		6.58			
				- Kopi ( kw/ha )	0.42	0.41		0.47		0.5		0.53		0.56		2.47			
				- Kakao ( kw/ha )	0.54	0.58		0.6		0.63		0.66		0.68		3.15			
				- Cengkeh ( kw/ha )	0.72	0.74		0.76		0.78		0.8		0.83		3.91			
				- Lada (kw/ha)	0.29	0.31		0.34		0.36		0.39		0.42		1.82			
				- Pala (kw/ha)	0.23	0.27		0.32		0.37		0.41		0.55		1.92			
				- Tebu ( kw/ha )	40.5	42		43.5		45		46.5		48		225			
				- Tembakau ( kw/ha )	0.83	0.85		0.87		0.88		0.9		0.92		4.42			
		05	Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian	Jumlah dokumen rancangan Perda LP2B yang Representatif (dokumen)	1	1	264,360	1	300,000	1	350,000	1	400,000	1	450,000	5	1,764,360	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
		11	Intensifikasi, Rehabilitasi, Diversifikasi dan Ekstensifikasi Tanaman Perkebunan	luas lahan intensifikasi tanaman perkebunan (Ha)	2500	25	15,262	25	15,262	25	15,262	25	15,262	25	15,262	125	76,310	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
		16	Peningkatan Pelayanan Operasional UPT Balai Benih Hortikultura	Jumlah pendukung administrasi perkantoran UPT Balai Benih Hortikultura (paket)	-	12	85,000	12	95,000	12	105,000	12	110,000	12	115,000	60	510,000	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
		17	Peningkatan Pelayanan Operasional UPT Balai Benih Padi Palawija	Jumlah pendukung administrasi perkantoran UPT Balai Benih Palawija(paket)	-	12	95,000	12	105,000	12	115,000	12	120,000	12	125,000	60	560,000	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone

		18	Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD Balai Benih Perkebunan	Jumlah pendukung administrasi perkantoran UPT Balai Benih Perkebunan (paket)	-	12	80,000	12	90,000	12	100,000	12	105,000	12	110,000	60	485,000	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
		19	Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD Penyuluhan	Jumlah pendukung administrasi perkantoran UPT Balai Penyuluhan (paket)	0	12	100,000	12	110,000	12	120,000	12	125,000	12	130,000	60	585,000	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
		20	Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD Mekanisasi Pertanian	Jumlah pendukung administrasi Mekanisasi Pertanian (paket)	0	12	80,000	12	90,000	12	100,000	12	105,000	12	120,000	60	495,000	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
		21	Perlindungan dan pengendalian OPT tanaman perkebunan	Jumlah sosialisasi/bintek pengendalian OPT tanaman perkebunan (kegiatan)	5	6	300,000	6	300,000	6	300,000	6	300,000	6	300,000	30	1,500,000	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
		2.01.20	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN</b>	<b>Persentase Tenaga Penyuluh yang Terlatih (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1,364,528</b>	<b>100</b>	<b>1,495,981</b>	<b>100</b>	<b>1,635,578</b>	<b>100</b>	<b>1,786,135</b>	<b>100</b>	<b>1,944,745</b>	<b>100</b>	<b>8,226,967</b>	<b>Dinas Pertanian TPHP</b>	<b>Kab. Bone</b>
		01	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh/ Pertanian/ Perkebunan	Jumlah penyuluh pertanian perkebunan yang terlatih (Kegiatan)	80	1	550,000	1	600,000	1	650,000	1	700,000	1	750,000	5	3,250,000	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
		02	Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	Jumlah penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Tenaga Harian Lepas (THL-TB) yang terfasilitasi melalui biaya operasional (orang)	2.244	2.244	714,528	2244	785,981	2.244	864,578	2.244	953,035	2.244	1,048,335	11.220	4,366,457	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
		03	Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah Petani yang terlatih (orang)	60	50	100,000	50	110,000	50	121,000	50	133,100	50	146,410	250	610,510	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
		2.01.27	<b>PROGRAM STANDARISASI KUALITAS BAHAN BAKU</b>	<b>Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>128,780</b>	<b>100</b>	<b>130,000</b>	<b>100</b>	<b>143,000</b>	<b>100</b>	<b>157,300</b>	<b>100</b>	<b>188,549</b>	<b>100</b>	<b>618,849</b>	<b>Dinas Pertanian TPHP</b>	<b>Kab. Bone</b>
		01	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi	Jumlah sarana prasarana produksi penunjang kegiatan UPT (paket)	481	5	128,780	5	130,000	5	143,000	5	157,300	5	188,549	25	618,849	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone

		2.01.28	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU HASIL PERKEBUNAN BERKELANJUTAN	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani (%)	100	100	909,500	100	1,120,500	100	1,131,500	100	1,142,500	100	1,153,500	100	5,457,500	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
		01	Pengembangan Bibit Unggul Berkelanjutan	Jumlah Bantuan Bibit Perkebunan (pohon)	13.217	14.500	159,500	15.500	170,500	16.500	181,500	17.500	192,500	18.500	203,500	82.500	907,500	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
		02	Pengembangan Teknologi Budidaya Perkebunan	Jumlah Pelatihan Teknologi Budidaya Perkebunan yang dilaksanakan (kegiatan)	2	1	600,000	1	750,000	1	750,000	1	750,000	1	750,000	5	3,600,000	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
		03	Pengadaan sarana pengolahan pasca panen	Jumlah alat pasca panen yang diadakan (paket)	2	3	150,000	3	150,000	3	150,000	3	150,000	3	150,000	15	750,000	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
		04	Temu teknologi berorientasi agribisnis komoditi perkebunan	Jumlah peserta temu teknologi agribisnis (orang)	-	-	-	100	50,000	100	50,000	100	50,000	100	50,000	400	200,000	Dinas Pertanian TPHP	Kab. Bone
			JUMLAH				45,008,956		57,892,021		116,670,305		249,978,186		276,103,982		788,894,423		



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya indikator akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Indikator Kinerja yang akan dicapai Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan sebagai komitmen kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, disajikan dengan tabel 7.1. berikut ini.

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018 - 2023**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal Tahun 2018	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
					Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP	CC	CC	CC	CC	BB	BB
2	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan	Kontribusi produksi pertanian terhadap PDRB (%)	49,37	49,37	49,37	49,37	49,37	49,37
			Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar (%)	49,21	49,21	49,25	49,30	49,40	49,45
			Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	46,55	48,88	51,29	53,86	56,55	59,93

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan teknis operasional dinas selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan melaksanakan berbagai program kegiatan, yang dijadikan acuan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone.

Program pembangunan pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan dari beberapa program di atas difokuskan pada aspek ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, aspek ketersediaan pangan, agribisnis dan perkebunan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bone, dimana operasional program pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan, sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan nilai tambah yang tinggi sehingga mampu meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat tani.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini, sangat tergantung pada komitmen bersama antara seluruh aparatur dinas dengan masyarakat serta dukungan dari pihak terkait lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka seluruh pelaksanaan pembangunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah menyampaikan saran dan masukan. Semoga Allah S.W.T meridhoi dan selalu memberi rahmat serta petunjuk kepada semua pelaku pembangunan pertanian demi tercapainya ketahanan pangan, kesejahteraan petani, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.